

Tingkat Kompetensi Kewarganegaraan Ekologis Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama

Sarbaini ^{a,1*}, Reja Fahlevi ^{a,2}

^a Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, Indonesia

¹ sarbain@ulm.ac.id*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 November 2022;

Revised: 1 Desember 2022;

Accepted: 23 Desember 2022.

Kata-kata kunci:

Kompetensi

Kewarganegaraan;

Lingkungan;

Guru Pendidikan

Pancasila dan

Kewarganegaraan.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi ekosistem sungai di Banjarmasin. Peran guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam perspektif Kewarganegaraan Lingkungan perlu dioptimalkan. Namun belum diketahui dan belum ada penelitian terhadap tingkat dan dimensi kewarganegaraan lingkungan di tingkat Sekolah Menengah Pertama, khususnya terhadap guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara dan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kriteria dan kategori Tingkat Kewarganegaraan Lingkungan berdasarkan kategori dari Karetekin. Temuan penelitian menunjukkan tingkat kewarganegaraan lingkungan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara keseluruhan berada pada level sedang, terutama dalam indikator sikap warga negara lingkungan yakni menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan berada dalam tingkat yang sangat rendah. Tingkat Kewarganegaraan lingkungan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan belum mencapai tingkat yang memuaskan, karena masih masih berada pada tingkat sedang dan rendah. Rekomendasi dalam penelitian ini perlu penguatan dan penegakkan nilai-nilai ekologis melalui sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai ekologis. dan memungkinkan perilaku pro-lingkungan dan pada gilirannya memberikan penguatan untuk nilai-nilai ekologis.

ABSTRACT

Ecological Citizenship Competency Levels of Pancasila and Citizenship Education Teachers in Junior High Schools. This research is motivated by the condition of the river ecosystem in Banjarmasin. The role of Pancasila and Citizenship Education teachers in the perspective of Environmental Citizenship needs to be optimized. However, it is not yet known and there has been no research on the levels and dimensions of environmental citizenship at the junior high school level, especially on Pancasila and Citizenship Education teachers. This research approach is quantitative research. Data and information collection techniques were carried out through questionnaires, interviews and documentation studies. The data analysis technique uses the criteria and categories of Environmental Citizenship Level based on the category from Karetekin. The research findings show that the level of environmental citizenship of Pancasila and Citizenship Education teachers as a whole is at a moderate level, especially in terms of the attitude of environmental citizens, namely using more natural resources than we need, not threatening the health and welfare of people in the future, which is at a low level. very low. The level of citizenship in the environment of Pancasila and Citizenship Education teachers has not yet reached a satisfactory level, because they are still at medium and low levels. The recommendations in this study need to strengthen and enforce ecological values through an education system that consistently reinforces ecological values. and enabling pro-environmental and destructive behavior to provide reinforcement of ecological values.

Keywords:

Civic Competence;

Environment;

Pancasila and

Citizenship Education

Teacher.

Copyright © 2022 (Sarbaini & Reja Fahlevi). All Right Reserved

How to Cite : Sarbaini, & Fahlevi, R. (2022). Tingkat Kompetensi Kewarganegaraan Ekologis Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(2), 206–218. <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7674>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Krisis lingkungan global saat ini dengan berbagai masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi membuat kewarganegaraan lingkungan menjadi suatu keharusan. Kewarganegaraan lingkungan sangat penting dalam penelitian keberlanjutan. Kekritisitas terhadap krisis lingkungan yang diamati membutuhkan warga lingkungan yang cakap dan kompeten yang dapat bertindak sebagai agen perubahan untuk mencapai keberlanjutan. Memberdayakan orang untuk menjadi warga lingkungan sangat penting untuk mengatasi masalah lingkungan saat ini dan kondisi keberlanjutan yang diperlukan (Hadjichambis dan Hadjichambi, 2020).

Masalah lingkungan menjadi persoalan besar sekarang ini di Indonesia. Menurut Survei Litbang Koran Sindo (2018), terdapat 10 problem besar lingkungan di Indonesia, yakni sampah (40%), banjir (20%), sungai tercemar (11%), pemanasan global (10%), pencemaran udara (6%), rusaknya ekosistem laut (4%), sulitnya air bersih (3%), kerusakan hutan (2%), abrasi (2%), dan pencemaran (2%). Nada yang sama dikemukakan oleh Nahrudin (2018) bahwa isu-isu strategis permasalahan lingkungan hidup terdiri dari ilegal logging, pertambangan illegal, pencemaran laut, dan alih fungsi lahan pertanian.

Sementara di Kalimantan Selatan, isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan adalah persoalan Meratus, lubang tambang, dan kabut asap (Rifani, 2019). Selain itu kondisi lingkungan sudah memprihatinkan, kerusakan terus bertambah, karena kegiatan pertambangan, usaha perkebunan dengan pembukaan lahan yang kurang terkendali atau mematuhi ketentuan sebagaimana Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup (Hasan, 2015), bahkan Indeks kualitas lingkungan Kalimantan Selatan terburuk di Kalimantan dan menempati urutan 26 dari 33 provinsi di Tanah Air. (Susanto, 2017).

Sebagai lingkungan yang sebagian besar berbasis lahan basah, termasuk sungai. Kondisi sungai-sungai besar di Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir mengalami pencemaran berat, yakni sungai Barito, sungai Martapura dan sungai Nagara (PPKL KLHK RI, 2019). Penyebabnya adalah tak terkendalinya jumlah bakteri fecal coliform serta total coliform yang datang dari limbah kotoran hewan dan manusia, terutama banyaknya jamban di sungai, dan aktivitas pembuangan limbah pertambangan batu bara secara serampangan juga menjadi biang masalahnya. (DLHD Kalimantan Selatan, 2018).

Untuk daerah Banjarmasin, masalah-masalah lingkungan berhubungan dengan "sakitnya" sejumlah sungai, karena tingginya tingkat keasaman, akibat eksploitasi lahan gambut, seperti masifnya lahan sawit, persawahan dan pemukiman, kandungan bakteri coli yang sangat tinggi di atas ambang normal, tingkat kekeruhan sungai di Banjarmasin yang terkontaminasi lumpur akibat erosi dan kerusakan hutan wilayah hulu. Kondisi sungai di Banjarmasin sudah dalam kategori gawat dan di ambang batas tercemar berat. Selain itu ekosistem sungai mulai terancam, karena kebiasaan buruk warga membuang sampah ke sungai, jika dahulu berupa limbah rumah tangga berupa sayuran dan ikan, sekarang berupa limbah plastik. (Rizky Irmata, 2018).

Penyebab utama terjadinya masalah-masalah kerusakan lingkungan adalah kurangnya kesadaran warga negara dalam menjaga dan melestarikan lingkungan, serta disebabkan oleh perilaku warga negara yang salah terhadap lingkungan (Prasetyo dan Budimansyah, 2016; Sudarmadi dkk, 2011; Rizky Irmata, 2018). Dalam menghadapi masalah kerusakan lingkungan dan pengelolaannya, dituntut peran pemerintah, legislator, penegak hukum, serta masyarakat

sebagai warga negara. Di negara Indonesia, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup (UUPLH) Pasal 5 ayat (3) menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Partisipasi dan tanggung jawab warga negara amat dibutuhkan dalam menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud kesadaran terhadap hak, kewajiban, keberlanjutan dan keadilan ekologis, sebab manusia merupakan bagian dari lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep kewarganegaraan yang tidak lagi mengacu kepada konsep kewarganegaraan klasik dari T.H. Marshall yang berdimensi sipil, politik, dan sosial (Abowitz dan Harnish, 2006), atau legal, politik dan sosial (Iija, 2011), tetapi telah melintasi dimensi-dimensi yang lain, seperti sosial, ekonomi dan politik (MacCregor et al., 2005), kultural (Rosaldo, 1994; Ong, 1996), dan lingkungan (Jagers dan Martisson, 2010).

Kewarganegaraan ekologis pada hakikatnya meliputi pemahaman tentang isu-isu ekologi, hak-hak, tanggung jawab warga negara dalam isu lingkungan hidup, maka tindakan yang dilakukan tidak hanya mengatasi masalah lingkungan, tetapi juga untuk mempromosikan interaksi manusia yang positif dan berkelanjutan dengan lingkungan sekitar (Berkowitz dkk, 2005:227; Clarke & Agyeman, 2011:1775; Latta, 2007:18; Gabrielson & Cawley, 2010:605; Gebbels, Evans, & Delany, 2011:13). Dalam kajian terdahulu yang dilakukan oleh MacPherson (2005) mengemukakan bahwa nilai-nilai ekologis, inkuiri interdisipliner, dan praktik secara refleksi dengan pedagogi afektif harus ada dalam pendidikan kewarganegaraan lingkungan. Sedangkan dalam kajian Dobson (2003) yang mendukung integrasi pendidikan lingkungan dan pendidikan kewarganegaraan, dan diimplementasikan oleh para guru di sekolah-sekolah. Guru memainkan peran penting dalam menumbuhkan warganegara-warganegara lingkungan yang membela tata sosial yang baru.

Tingkat kewarganegaraan ekologis mengacu pada skala kewarganegaraan ekologis, yang baru saja dikembangkan oleh Hadjichambis dan Hadjichambi (2020), mengacu kepada faktor; 1) kegiatan sebagai warga negara lingkungan di masa dulu dan sekarang, 2) kompetensi-kompetensi dari warga negara lingkungan, 3) kegiatan sebagai warga negara lingkungan di masa depan. Hadjichambis dan Reis (2020) telah menyarankan bahwa kewarganegaraan lingkungan harus dikonseptualisasikan untuk pendidikan abad ke-21. Kompetensi-kompetensi yang hendaknya dimiliki oleh guru dan siswa sebagai warga negara lingkungan berbasis kewarganegaraan lingkungan adalah terdiri dari pengetahuan, konsepsi-konsepsi, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai sebagai warga negara lingkungan. Sementara kegiatan-kegiatan sebagai warga negara lingkungan meliputi Tindakan di masa lalu, sekarang dan akan datang, baik di dalam sekolah, di luar sekolah. Tingkat kewarganegaraan ekologis bisa dikur melalui beberapa hal mulai dari kegiatan, pengetahuan, konsepsi perilaku, keterampilan, sikap, nilai-nilai, dan tindakan partisipasi baik itu partisipasi dalam ruang lingkup sekolah, luar sekolah dan sebagai agen perubahan.

Kajian kewarganegaraan lingkungan terkait dengan lingkungan sungai, terutama di Kalimantan Selatan, amat terbatas, baru kajian implementasi karakter peduli lingkungan sungai berbasis ekologis melalui program Adiwiyata di SDN 1 Basirih (Reja Fahlevi, Fathul Jannah, dan Raihanah Sari, 2020). Namun hasil penelitian itu hanya mendeskripsikan bahwa karakter peduli lingkungan sudah terintegrasi dalam program Adiwiyata, belum mengukur tingkat dan dimensi

kewarganegaraan lingkungan siswa, apalagi para gurunya. Selain itu belum ada penelitian terhadap tingkat dan dimensi kewarganegaraan lingkungan di tingkat SMP, khususnya terhadap guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ialah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Populasi penelitian adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) SMPN di bantaran sungai kota Banjarmasin. Sampel lokus penelitian ditentukan dengan teknik *purposive sampling* yaitu SMPN yang terletak di bantaran sungai di kota Banjarmasin. Responden penelitian adalah guru PPKn yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni guru yang mengajar PPKn di SMPN yang menjadi lokus penelitian. Dari pendataan jumlah guru PPKn di 35 SMPN diperoleh sebanyak 48 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah Kuesioner Kewarganegaraan Lingkungan. Untuk mengukur Tingkat dan Dimensi Kewarganegaraan Lingkungan menggunakan kriteria dan kategori Tingkat Kewarganegaraan Lingkungan berdasarkan kategori dari Karetikin (2018), yakni: skor Mean 1.00 - 1.80 (Hampir tidak pernah/Sangat Rendah); 1.81 - 2.60 (Jarang/Rendah); 2.61 - 3.40 (Kadang-kadang/Sedang); 3.41 - 4.20 (Biasanya/Tinggi); dan 4.21 - 5.00 (Selalu /Amat Tinggi).

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan ini berisi mengenai tingkat kompetensi kewarganegaraan ekologis yang diukur dari tingkat pengetahuan warga negara terhadap lingkungan, konsep perilaku warga negara, keterampilan warga negara, sikap warga negara, dan nilai-nilai warga negara yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Indikator-indikator tersebut berdasarkan pemikiran dari Hadjichambis dan Reis (2020) Kompetensi-kompetensi kewarganegaraan ekologis yang hendaknya dimiliki oleh guru sebagai warga negara lingkungan berbasis kewarganegaraan ekologis adalah terdiri dari pengetahuan, konsepsi-konsepsi, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai sebagai warga negara lingkungan.

Tabel 1 Tingkat Pengetahuan Warga Negara Ekologis

No.	Pengetahuan untuk Warga Negara Ekologis	\bar{X}	SD	Tingkat
1	Bagaimana berkontribusi pada pencegahan masalah lingkungan	3,00	0,771	Sedang
2	Bagaimana berkontribusi pada pemecahan masalah lingkungan	2,93	0,726	Sedang
3	Bagaimana mengembangkan hubungan yang sehat dengan alam	3,08	0,738	Sedang
4	Bagaimana berkontribusi pada pencapaian lingkungan yang keberlanjutan	2,87	0,788	Sedang
5	Apa hak-hak dan kewajiban-kewajiban lingkungan dari warganegara	3,29	0,797	Sedang
6	Bagaimana menilai penyebab struktural dari kerusakan lingkungan dan akar masalahnya	2,89	0,928	Sedang
7	Bagaimana untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat	3,14	0,743	Sedang
8	Bagaimana mempromosikan antar dan inter-generasi keadilan	2,68	0,902	Sedang
9	Bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat lokal (komunitas, kota, daerah)	2,45	0,988	Rendah

10	Bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat nasional	2,27	1,026	Rendah
11	Bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat global	2,35	1,175	Rendah
		2,81	0,335	Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn sebagai Warga Negara Lingkungan, berupa pengetahuan rata-rata berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun pada pengetahuan tentang bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat lokal (komunitas, kota, daerah), di tingkat nasional, dan di tingkat global masih berada pada tingkat yang rendah, atau jarang dilakukan. kompetensi pengetahuan adalah bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat lokal [komunitas, kota, daerah], nasional dan global. Sementara kompetensi sikap adalah menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan.

Temuan penelitian dari kompetensi pengetahuan yang berada pada level rendah adalah bagaimana melakukan kegiatan dan membuat jejaring [network] di tingkat lokal [komunitas, kota, daerah], nasional dan global, menunjukkan masih kurangnya dilakukan kegiatan dan jejaring di tingkat lokal, nasional dan global, karena kurangnya pengetahuan, pemahaman, kepekaan dan pengalaman dalam literasi kewarganegaraan. Literasi kewarganegaraan adalah kemampuan untuk menggunakan pemahaman tentang sistem sosial (politik, ekonomi, dll.), keterampilan dan kebiasaan berpikir untuk berpartisipasi dalam dan/atau mempelajari masyarakat (Berkowitz et al 2005; Olson dan Worsham, 2012). Kewarganegaraan Lingkungan mengacu pada tindakan pro-lingkungan baik di depan umum (pola konsumsi, aksi-aksi politik, partisipasi aktif, dll.) dan pribadi (mendaur ulang, melestarikan sumber daya, dll.) domain yang dilakukan oleh warga negara dan didorong oleh keyakinan akan keadilan distribusi sumber daya publik (Dobson, 2007).

Tabel 2 Tingkat Konsepsi Perilaku Warga Negara Ekologis

No	Konsepsi Perilaku Warga Negara Ekologis	\bar{X}	SD	Tingkat
1	Memberikan suara di setiap pemilihan nasional	3,64	0,483	Tinggi
2	Bergabung dengan partai politik	2,33	0,694	Rendah
3	Mengikuti isu lingkungan di koran, di radio, di TV, atau di Internet	3,48	0,652	Tinggi
4	Menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah	3,54	0,582	Tinggi
5	Terlibat dalam diskusi-diskusi lingkungan	3,10	0,905	Sedang
6	Melakukan upaya pribadi untuk melindungi sumber daya alam (misalnya, melalui penghematan air atau daur ulang sampah)	3,71	0,581	Tinggi
7	Menghormati hak orang lain untuk memiliki pendapatnya sendiri	3,58	0,871	Tinggi
8	Mendukung orang-orang yang lebih buruk dari kamu	2,17	1,136	Rendah
9	Terlibat dalam kegiatan untuk membantu orang-orang di negara-negara miskin	3,06	0,697	Sedang
10	Berpartisipasi dalam protes damai menentang hukum yang diyakini tidak adil	3,13	0,890	Sedang
11	Mengikuti isu lingkungan di koran, di radio, di TV, atau di Internet	3,42	0,539	Tinggi
12	Menunjukkan rasa hormat kepada pemerintah	3,60	0,494	Tinggi
		3,23	0,508	Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Konsepsi Perilaku Warga Lingkungan rata-rata berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun pada konsepsi bergabung dengan partai politik berada pada tingkat yang rendah, atau jarang dilakukan. Sementara pada konsepsi mendukung orang-orang yang lebih buruk, pilihannya memang benar, berada pada tingkat yang rendah.

Kompetensi konsepsi perilaku adalah bergabung dengan partai politik. Sedangkan untuk posisi rendah, dalam perspektif positif adalah untuk kompetensi konsepsi perilaku adalah mendukung orang-orang yang lebih buruk, dan kompetensi nilai-nilai dalam hal memiliki kekuasaan terhadap orang lain. Kewarganegaraan Lingkungan adalah perilaku penting dan spesifik atau serangkaian perilaku dalam konteks tertentu termasuk lingkungan serta isu-isu kewarganegaraan dan menunjukkan bahwa individu membutuhkan baik pengetahuan lingkungan dan pengetahuan kewarganegaraan untuk mengembangkan Kewarganegaraan Lingkungan mereka (Lalic, et al, 2020), diperkuat dengan pemahamannya (Hay, 2002), kepekaan (Kollmuss dan Agyeman 2002). Menurut penelitian Chawla (1998), pengalaman terpenting yang menentukan kepekaan lingkungan adalah pengalaman masa kanak-kanak di alam, pengalaman pro-kerusakan lingkungan, nilai-nilai pro-lingkungan yang dipegang oleh keluarga, organisasi pro-lingkungan, panutan (guru atau teman) dan pendidikan.

Tabel 3 Tingkat Keterampilan Warga Negara Ekologis

No.	Keterampilan Warga Negara Ekologis	\bar{X}	SD	Tingkat
1	Mendiskusikan artikel surat kabar tentang konflik lingkungan	3,15	0,504	Sedang
2	Perlihatkan sudut pandang kamu tentang isu lingkungan yang kontroversial	2,93	0,783	Sedang
3	Mengorganisir sekelompok siswa untuk melakukan perubahan-perubahan lingkungan di sekolah	3,25	0,758	Sedang
4	Mengikuti debat televisi tentang isu lingkungan yang kontroversial	2,62	0,815	Sedang
5	Menulis surat atau email ke surat kabar yang memuat pandangan anda tentang isu lingkungan saat ini	2,79	0,770	Sedang
6	Berbicara di depan kelas kamu tentang masalah lingkungan	3,52	0,545	Tinggi
		3,04	0,327	Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Keterampilan Warga Negara Ekologis rata-rata berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun pada keterampilan Berbicara di depan kelas kamu tentang masalah lingkungan ternyata berada pada tingkat yang tinggi, atau sudah biasa melakukannya.

Unsur keterampilan warga negara menurut Steenbergen (1994) memainkan peran kunci bagi kewarganegaraan lingkungan. Keterampilan menunjukkan adanya keterlibatan individu dan masyarakat serta cara-cara mempengaruhi dalam proses pembuatan keputusan (Karatekin dan Elvan, 2016), menunjukkan perilaku partisipatif dalam upaya untuk memenuhi tanggungjawab-tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban. Akyüz (2001) menjelaskan keterampilan dalam perspektif hak-hak lingkungan seperti untuk mempengaruhi pembuatan, perubahan, proteksi dan pembangunan berkelanjutan dari orang yang hidup dalam suatu lingkungan. Karena itu partisipasi untuk resolusi problem-problem lingkungan adalah hak pada saat yang sama seperti tanggung jawab sebagai suatu tugas (Karatekin, Kuş dan Merey, 2013).

Kewarganegaraan ekologis merupakan perilaku pro-lingkungan yang bertanggung jawab, memiliki kompetensi, bertindak secara kritis-aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat sebagai agen perubahan, dalam ruang privat dan publik pada skala lokal, nasional dan global, melalui tindakan individu dan kolektif menuju pemecahan masalah-masalah lingkungan kontemporer, mencegah terciptanya masalah-masalah lingkungan baru, mencapai kemampuan berkelanjutan dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan alam. (ENEC 2018a). Kewarganegaraan lingkungan merupakan mekanisme dari partisipasi politik dalam proses-proses pembuatan keputusan (Martinho, Nicolau, Caeiro, Amador & Oliveira, 2010).

Tabel 4 Tingkat Sikap Warga Negara Ekologis

No.	Sikap Warga Negara Ekologis	\bar{X}	SD	Tingkat
1	Menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan	1,94	0,860	Sangat Rendah
2	Kami membutuhkan undang-undang dan peraturan yang lebih ketat untuk melindungi lingkungan	3,62	0,489	Tinggi
3	Penting untuk mengambil tindakan terhadap masalah yang berhubungan dengan perubahan iklim	3,35	0,483	Sedang
4	Setiap orang harus diberi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, nilai, dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup berkelanjutan	3,54	0,713	Tinggi
5	Kita yang hidup sekarang harus memastikan bahwa orang-orang di masa depan menikmati kualitas hidup yang sama seperti yang kita lakukan hari ini	3,46	0,824	Tinggi
6	Wanita dan pria di seluruh dunia harus diberi kesempatan yang sama untuk pendidikan dan pekerjaan	3,69	0,689	Tinggi
7	Perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengurangi penggunaan kemasan dan barang sekali pakai, termasuk plastik	3,65	0,811	Tinggi
8	Penting untuk mengurangi kemiskinan	3,69	0,689	Tinggi
9	Perusahaan-perusahaan di negara kaya harus memberikan kondisi yang sama kepada karyawannya di negara-negara miskin, seperti di negara-negara kaya	3,29	0,713	Sedang
		3,35	0,551	Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Sikap sebagai Warga Negara ekologis rata-rata umumnya berada pada tingkat yang sedang, atau kadang-kadang saja dilakukan. Namun dilihat secara mendetil, nampaknya bervariasi, tinggi, sedang, dan rendah. Sikap yang berada pada tingkat rerata yang sangat rendah adalah menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan.

Temuan level rendah dalam kompetensi sikap adalah menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan, memperlihatkan sikap dan keyakinan memperlakukan ketidakadilan distribusi terhadap sumber daya publik. Sikap lingkungan sebagai kecenderungan psikologis yang diungkapkan dengan mengevaluasi lingkungan alam dengan beberapa derajat mendukung atau

tidak (Milfont dan Duckitt, 2010). Banyak penelitian yang mendukung peran prediktif sikap lingkungan, ketika menjelaskan perilaku lingkungan (Collado dan Corraliza, 2015; Cheng dan Monroe, 2012; Grønhøj dan Thgersen, 2017).

Keyakinan merupakan inti dari semua perilaku manusia (Fishbein dan Ajzen, 2011). Keyakinan terbentuk sebagian besar merupakan fungsi dari interaksi faktor lingkungan dan sifat bawaan (Poškus, 2017; Fishbein dan Ajzen, 2011), melalui pendidikan, mengamati lingkungan, karakteristik individu, pengalaman subjektif dan interpretasi, mempengaruhi individu memahami informasi yang diterima dari lingkungan eksternal (Poškus, 2017).

Tabel 5 Tingkat Nilai-Nilai Warga Negara Ekologis

No.	Nilai-nilai Warga Negara Ekologis	\bar{X}	SD	Tingkat
1	Cegah pencemaran lingkungan	3,75	0,668	Tinggi
2	Lindungi lingkungan	3,73	0,676	Tinggi
3	Hormati alam	3,60	0,869	Tinggi
4	Bersatu dengan alam	3,42	0,739	Tinggi
5	Setiap orang memiliki kesempatan yang sama	3,52	0,771	Tinggi
6	Jaga mereka yang lebih buruk	2,69	1,223	Sedang
7	Setiap orang diperlakukan dengan adil	3,69	0,689	Sedang
8	Tidak ada perang atau konflik	3,39	0,939	Sedang
9	Bermanfaat untuk orang lain	3,58	0,767	Tinggi
10	Bersenang-senang	2,63	1,003	Sedang
11	Nikmati kesenangan hidup	3,00	0,825	Sedang
12	Lakukan hal-hal yang saya sukai	3,00	0,923	Sedang
13	Memiliki kontrol terhadap tindakan orang lain	2,81	0,891	Sedang
14	Memiliki kekuasaan terhadap orang lain	1,98	0,911	Rendah
15	Jadilah orang yang berpengaruh	2,69	0,854	Sedang
		3,16	0,525	Sedang

Data tentang kompetensi guru PPKn berupa Nilai-nilai yang diyakini sebagai Warga Negara Ekologis rata-rata umumnya berada pada tingkat yang sedang. Namun dilihat secara mendetil, nampaknya bervariasi, tinggi, sedang, dan rendah. Sikap yang berada pada tingkat rerata yang tinggi adalah Cegah pencemaran lingkungan, Lindungi lingkungan, Hormati alam, Bersatu dengan alam, Setiap orang memiliki kesempatan yang sama, dan Bermanfaat untuk orang lain. Sementara nilai-nilai yang berhubungan dengan Memiliki kekuasaan terhadap orang lain, berada pada tingkat yang rendah.

Keyakinan membentuk nilai-nilai seseorang, namun berpotensi dapat dibentuk dan diubah melalui pendidikan (Myry et al, 2013; Krishnan, 2008; Chatard dan Selimbegovic, 2007), orientasi nilai (Inglehart dan Baker, 2000), terutama nilai-nilai pro-lingkungan. Kewarganegaraan Lingkungan pada intinya didasarkan pada nilai-nilai, seperti keadilan distribusi sumber daya lingkungan, partisipasi masyarakat, dan kreasi bersama dari kebijakan keberlanjutan, di antara yang lain (Schild, 2016), menghubungkan berbagai aksi pro-lingkungan dengan nilai-nilai (Steg et al, 2014a, b; van der Werff et al, 2013, 2014); menyentuh beberapa motivasi dan keyakinan masyarakat (yaitu norma sosial, Abrahamse dan Steg, 2013), merupakan kunci untuk Warga Negara Lingkungan (Stern et al, 1999).

Banyak penelitian tentang bagaimana nilai berhubungan dengan komponen yang sangat penting dari Kewarganegaraan Lingkungan- perilaku pro-lingkungan (Steg et al, 2014a, b; Thøgersen dan Ölander, 2002), yakni empat orientasi nilai, yaitu, nilai hedonistik, egoistik,

altruistik dan biosfer (Steg et al, 2011; Nordlund dan Garvill, 2002; Stern et al, 1999). Menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang dibutuhkan adalah wujud dari nilai hedonistik dan egoistik. Nilai hedonistik dan egoistik (Steg dan DeGroot, 2012), biasanya berhubungan negatif dengan tindakan pro lingkungan, karena sering berkonflik langsung dengan hasil lingkungan, cenderung mengorbankan lingkungan untuk kesenangan sendiri, melayani diri sendiri, seringkali dengan mengorbankan, setidaknya tanpa memperhatikan orang lain. Untuk mempromosikan Kewarganegaraan Lingkungan, seseorang harus bertujuan untuk pola nilai tertentu, di mana nilai altruistik dan biosfer bekerja bersama-sama untuk menciptakan keterlibatan sosial dan individu yang sadar lingkungan. Perlu penguatan dan penegakkan nilai-nilai melalui, Pertama, sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai pro-lingkungan. Kedua, lingkungan perlu memperkuat dan memungkinkan perilaku pro-lingkungan dan pada gilirannya memberikan penguatan untuk nilai-nilai pro-lingkungan (Bardi dan Goodwin, 2011). Ketiga, menerapkan model prediksi, untuk memprediksi dan menjelaskan tindakan yang relevan dengan Kewarganegaraan Lingkungan, yakni model Nilai-Keyakinan-Norma, Values-Belief-Norm (VBN) (Stern, 2000; Stern et al, 1999) dan Teori Perilaku Terencana, Theory of Planned Behavior (TPB) (Fishbein dan Ajzen, 2011; Ajzen, 1991).

Dalam upaya untuk meningkatkan level kewarganegaraan lingkungan, terutama melahirkan perilaku keteraturan dan konsistensi mahasiswa calon guru pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan penanaman, pengembangan dan pembinaan nilai-nilai, kompetensi, perilaku ekologis melalui variabel-variabel yang mempengaruhi terhadap penumbuhan kewarganegaraan lingkungan (Karatekin and Uysal, 2018), seperti tingkat keinginan tahu terhadap lingkungan dan frekuensi partisipasi pada aktivitas-aktivitas lingkungan. Selain itu kompetensi ekologis berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dapat dibentuk melalui model-model pembelajaran, di antaranya model pembelajaran kontekstual dan berbasis problem (Pertwi dan Samsuri, 2017), pengembangan komunitas warga negara peduli lingkungan (Prasetiyo dan Budimansyah, 2016), strategi pembentukan kewarganegaraan ekologis melalui persekolahan (Mariyani, 2017), rekonstruksi kewarganegaraan ekologis melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis ecoliteracy (Rondli dan Yuli, 2017), dan menciptakan kewarganegaraan ekologis era digital (Jannah, 2018).

Simpulan

Tingkat Kompetensi Kewarganegaraan Ekologis guru PPKn, rata-rata umumnya berada pada tingkat sedang, kecuali pada niat untuk bertindak di masa depan, terutama dalam indikator sikap warga negara lingkungan yakni menggunakan lebih banyak sumber daya alam daripada yang kita butuhkan, tidak mengancam kesehatan dan kesejahteraan orang di masa depan berada dalam tingkat yang sangat rendah. Tingkat Kewarganegaraan Lingkungan guru PPKn belum mencapai tingkat yang memuaskan, karena masih masih berada pada tingkat sedang dan rendah. Rekomendasi dalam penelitian ini perlu penguatan dan penegakkan nilai-nilai ekologis melalui sistem pendidikan yang secara konsisten memperkuat nilai-nilai ekologis dan memungkinkan perilaku pro-lingkungan dan pada gilirannya memberikan penguatan untuk nilai-nilai ekologis.

Referensi

A.C. Hadjichambis dan D.P.Hadjichambi. (2020). Environmental Citizenship Questionnaire (ECQ): The Development and Validation of an Evaluation Instrument for Secondary School Students. *Sustainability*.2020, 12, 821.

- Abowitz, Kathleen Knight and Harnish, Jason .(2006). *Contemporary Discourses of Citizenship. Review of Educational Research*. Winter 2006, Vol.76, No.4, pp.653-690.
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T).
- Akyüz, E. (2001). Çocuk hakları sözleşmesinin temel ilkeleri ışığında çocuğun eğitim hakkı, *MEB Dergisi*, Sayı: 151. In Karatekin, Kadir dan Uysal, Cevdet (2018). *Ecological Citizenship Scale Development Study*. *International Electronic Journal of Environmental Education*. Vol.8, Issue 2, 2018, 82-104.
- Bardi, A., & Goodwin, R. (2011). The dual route to value change: Individual processes and cultural moderators. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 42(2), 271–287. <https://doi.org/10.1177/0022022110396916>.
- Berkowitz, A. J., Ford, M. A., & Brewer, C. A. (2005). A framework for integrating ecological literacy, civics literacy, and environmental citizenship in environmental education. In E. A. Johnson & M. J. Mapping (Eds.), *Environmental education and advocacy: Changing perspectives of ecology and education* (pp. 227–266). Cambridge: Cambridge University Press.
- Chatard, A., & Selimbegovic, L. (2007). The impact of higher education on egalitarian attitudes and values: Contextual and cultural determinants. *Social and Personality Psychology Compass*, 1, 541–556. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00024.x>.
- Chawla, L. (1998). Significant life experiences revisited: A review of research on sources of proenvironmental sensitivity. *The Journal of Environmental Education*, 29(3), 11–21.
- Cheng, J., & Monroe, M. C. (2012). Connection to nature: Children’s affective attitude toward nature. *Environment and Behaviour*, 44(1), 31–49.
- Clarke, L., & Agyeman, J. (2011). Shifting the balance in environmental governance: Ethnicity environmental citizenship and discourses of responsibility. *Antipode*, 43 (1) Pp. 1773–1800.
- Collado, S., & Corraliza, J. A. (2015). Children’s restorative experiences and self- reported environmental behaviours. *Environment and Behaviour*, 47(1), 38–56
- DLHD Kalimantan Selatan, (2018). Retrieved Mei 7, 2019. Available at <http://kalsel.prokal.co/read/news/13501-lima-tahun-air-sungai-di-kalsel-tercemarberat>.
- Dobson, A. (2003). *Citizenship and the environment*, Newyork: Oxford University Press.
- Dobson, A. (2007). *Environmental Citizenship: Towards Sustainable Development*. *Sustainable Development Sust. Dev.* 15, 276–285.
- Fahlevi, Reja., Jannah, Fathul., dan Sari, Raihanah, (2020). Implementasi Karakter Peduli Lingkungan Sungai Berbasis Kewarganegaraan Ekologis Melalui Program Adiwiyata di Sekolah Dasar. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. Vol. 5 No. 2 (2020): Desember 2020. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/5069>.
- Fishbein, M., & Ajzen, I. (2011). *Predicting and changing behavior: The reasoned action approach*. New York: Psychology Press.
- Gabrielson, T., & Cawley, R. M. (2010). Plain member and citizen: Aldo Leopold and environmental citizenship. *Citizenship Studies*, 14 (1). Pp. 605–615.
- Gebbels, S., Evans, S. M., & Delany, J. E. (2011). Promoting environmental citizenship and corporate social responsibility through a school/industry/university partnership. *Journal of Biological Education*, 45 Pp. 13–19.
- Hasan, Syamsuddin. (2015). *Kerusakan Lingkungan Kalsel Memprihatinkan*. Retrieved Mei 8, 2019. Available at <https://kalsel.antaranews.com/berita/24317/kerusakan-lingkungan-kalsel-memprihatinkan>.
- Hay, P. R. (2002). *Main Currents in Western Environmental Thought* (pp. 120–152). Bloomington: Indiana University Press.
- Iija, Veera Ilona. (2011). *An Analysis of the Concept of Citizenship: Legal, Politic and Social Dimensions*. University of Helsinki Faculty of Sciences Social and Moral Philosophy. Master’s Thesis. December 2011. Retrieved Mei 8, 2019. Available at <https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/29256/veerasthesisFINAL.pdf?...>

- Inglehart, R., & Baker, W. E. (2000). Modernization, cultural change, and the persistence of traditional values. *American Sociological Review*, 65, 19–51. <https://doi.org/10.2307>
- Irmita, Rizk. (2018). Saat Sungai-sungai di Banjarmasin Menjadi “Sakit” Akibat Eksploitasi Lahan. Retrieved Mei 8, 2019. Available at <https://www.kanalkalimantan.com/saat-sungai-sungai-di-banjarmasin-menjadi-sakit-akibat-eksploitasi-lahan/>.
- Jagers & Matti., Jagers, S.C. & Martisson, S. (2010). Ecological citizens: Identifying values and beliefs that support individual environmental responsibility among Swedes. *Sustainability*. (2), 1055-1079.
- Jannah, Raudlatul. (2018). Menciptakan Kewarganegaraan Ekologis di Era Digital melalui Kampoeng Recycle Jember. *Journal of Urban Sociology*. Volume I. No.2. Oktober 2018.
- Karatekin, K. and Elvan, Ö. (2016). On the concept of democracy of 8th grade students cognitive structures. *Abant İzzet Baysal University Journal of the Faculty of Education*, 16(USBES Special Issue II), 1405-1431
- Karatekin, Kadir dan Uysal, Cevdet (2018). Ecological Citizenship Scale Development Study. *International Electronic Journal of Environmental Education*. Vol.8, Issue 2, 2018, 82-104.
- Kollmuss, A., & Agyeman, J. (2002). Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behavior? *Environmental Education Research*, 8(3), 239– 260. <https://doi.org/10.1080/13504620220145401>.
- Krishnan, V. R. (2008). Impact of MBA education on students' values: Two longitudinal studies. *Journal of Business Ethics*, 83(2), 233–246. <https://doi.org/10.1007/s10551-007-9614-y>
- Lalic, Marija Smederevac., Finger, David., Kovách, Imre., Lenhardt, Mirjana., Petrovic, Jelisaveta., Djikanovic, Vesna., Conti, Daniela and J de Pauw, elle Boeve.(2020). Knowledge and Environmental Citizenship, in in Hadjichambis, Andreas Ch, Reis, Pedro., Hadjichambi, Demetra Paraskeva, Činčera, Jan., de Pauw Jelle, Boeve., Gericke, Niklas, and Christine Knippels, Marie. Eds. (2020). *Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Latta, P. Alex. (2007). Locating democratic politics in ecological citizenship. *Environmental Politics* 16(3), 377-393.
- Levinson, Ralph., Hadjichambi, Demetra Paraskeva., Bedsted, Bjørn., Manov, Boris and Hadjichambis, Andreas Ch. (2020) Political Dimensions of environmental Citizenship, in Hadjichambis, Andreas Ch, Reis, Pedro., Hadjichambi, Demetra Paraskeva, Činčera, Jan., de Pauw Jelle, Boeve., Gericke, Niklas, and Christine Knippels, Marie. Eds. (2020). *Conceptualizing Environmental Citizenship for 21st Century Education*. Springer Open.
- Li, Ding., Zhao, Luman., Ma, Shuang., Shao, Shuai., and Zhang, Lixiao. (2019). What influences an individual's pro-environmental behavior? A literature review. *Journal of Cleaner Production*. Volume 146, 1 July 2019, Pages 28–34.
- MacPherson, S. (2005) Educating ecological citizens the blue planet. *Canadian Journal of Environmental Education*. 10, 141-156.
- Mariyani. (2017). Strategi Pembentukan Kewarganegaraan Ekologis. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*, 11 November 2017. Universitas Ahmad Dahlan. Yogyakarta. p-ISSN 2598-5973 e-ISSN 2599-008X, hal 10-17.
- Martinho, Nicolau, Caeiro, Amador, dan Oliveira (2010). Environmental Citizenship and Participation. The Role of Education Programs. *Knowledge Collaboration & Learning for Sustainable Innovation ERSCP-EMSU conference*, Delft, The Netherlands, October 25-29, 2010.
- Milfont, T. L., & Duckitt, J. (2010). The environmental attitudes inventory: A valid and reliable measure to assess the structure of environmental attitudes. *Journal of Environmental Psychology*, 30(1), 80–94.
- Myyry, L., Juujärvi, S., & Pessa, K. (2013). Change in values and moral reasoning during higher education. *European Journal of Developmental Psychology*, 10(2), 269–284. <https://doi.org/10.1080/17405629.2012.757217>.
- Nahrudin. (2018). Isu-isu Strategis Permasalahan Lingkungan. <https://osf.io>

- Nordlund, A. M., & Garvill, J. (2002). Value structures behind pro-environmental behavior. *Environment and Behavior*, 34(6), 740–756. <https://doi.org/10.1177/001391602237244>
- Olson, G., & Worsham, L. (2012). *Education as civic engagement: Toward a more democratic society* (p. 338). New York: Palgrave Macmillan.
- Ong, A. et al. (1996) Cultural citizenship as subject-making: immigrants negotiate racial and cultural boundaries in the United States. *Current anthropology* (1996): 737-762.
- Özden Özdemir, D. (2011). İlköğretim okullarında çevresel vatandaşlık eğitimi. Yayımlanmamış doktora tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- (2019). Model Review Related to the Effects of Teachers' Levels of Ecological Citizenship International Electronic Journal of Environmental Education.
- PPKL KLHK RI. (2019). Retrieved Mei 8, 2019. Available at <http://kalsel.prokal.co/read/news/13501-lima-tahun-air-sungai-di-kalsel-tercemarberat>.
- Poškus, M. S. (2017). Normative influence of pro-environmental intentions in adolescents with different personality types. *Current Psychology*, 1–14. <https://doi.org/10.1007/s12144-017-9759-5>
- Prasetyo, Wibowo Heru dan Budimansyah, Dasim. (2016). Warga Negara dan Ekologi; Studi Kasus Pengembangan Warga Negara Peduli Lingkungan dalam Komunitas Bandung Berkebun. *Jurnal Pendidikan Humaniora*. Vol.4 No.4, 2016. Retrieved Mei 8, 2019. Available at <http://journal.um.ac.id/index.php/jph/article/view/8221/3784>.
- Rifani, Reza. (2019). Tiga Isu Lingkungan Kalsel, Walhi: Wajib Jadi Prioritas Capres. Retrieved Mei 6, 2019. Available at www.iklancapres.id/.../tiga-isu-lingkungan-kalsel-walhi-wajib-jadi-
- Rondli, W.S dan Khoirinnida, Yuli. (2017). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Ecoliteracy: Upaya Rekonstruksi Kewarganegaraan Ekologis. Prosiding Seminar Nasional 15 Maret 2017 Aktualisasi Kurikulum 2013 di SD Melalui Gerakan Literasi Sekolah untuk Menyiapkan Generasi Unggul dan Berbudhi Pekerti. Retrieved Mei 10, 2019. Available at eprints.umk.ac.id/7379/17/14_Wawan_UMK.pdf.
- Rosaldo, R. (1994) Cultural Citizenship in San Jose, California. *PoLAR: Political and legal anthropology review* 17.2 (1994): 57-64.
- Schild, R. (2016). Environmental citizenship: What can political theory contribute to environmental education practice? *The Journal of Environmental Education*, 47(1), 19–34. <https://doi.org/10.1080/00958964.2015.1092417>.
- Steenbergen, B.V. (1994). Towards a global ecological citizen. Bart van Steenbergen (Ed.). *The condition of citizenship*. (pp.141-152). London: SAGE Publications.
- Steg, L., De Groot, J. I., Dreijerink, L., Abrahamse, W., & Siero, F. (2011). General antecedents of personal norms, policy acceptability, and intentions: The role of values, worldviews, and environmental concern. *Society and Natural Resources*, 24(4), 349–367. <https://doi.org/10.1080/08941920903214116>.
- Steg, L., & De Groot, J. I. M. (2012). Environmental values. In S. Clayton (Ed.), *The Oxford handbook of environmental and conservation psychology* (pp. 81–92). New York: Oxford University Press.
- Steg, L., Bolderdijk, J. W., Keizer, K., & Perlaviciute, G. (2014a). An integrated framework for encouraging pro-environmental behaviour: The role of values, situational factors and goals. *Journal of Environmental Psychology*, 38(1), 104–115. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.01.002>.
- Steg, L., Perlaviciute, G., van der Werff, E., & Lurvink, J. (2014b). The significance of hedonic values for environmentally relevant attitudes, preferences, and actions. *Environment and Behavior*, 46(2), 163–192. <https://doi.org/10.1177/0013916512454730>.
- Stern, P. C., Dietz, T., Abel, T., Guagnano, G. A., & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. *Human Ecology Review*, 6(2), 81–97.

- Stern, P. C. (2000). Toward a coherent theory of environmentally significant behaviour. *Journal of Social Issues*, 56(3), 407-424.
- Sudarmadi, S., dkk. (2001). A survey of perception, knowledge, awareness, and attitude in regard to environmental problems in a sample of two different social groups in Jakarta Indonesia. *Journal of Environment, Development and Sustainability*, Kluwer Academic Publishers, 3, 169-183.
- Susanto, Denny. (2017). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalsel Terburuk di Kalimantan. Retrieved Mei 7, 2019. Available at <https://mediaindonesia.com/read/detail/131706-indeks-kualitas-lingkungan-hidup-kalsel-terburuk-di-kalimantan>.
- Thøgersen, J., & Ölander, F. (2002). Human values and the emergence of a sustainable consumption pattern: A panel study. *Journal of Economic Psychology*, 23(5), 605-630. [https://doi.org/10.1016/S0167-4870\(02\)00120-4](https://doi.org/10.1016/S0167-4870(02)00120-4).
- Uysal, C. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının ekolojik vatandaşlık düzeylerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kastamonu. In Karatekin, Kadir (2019). Model Review Related to the Effects of Teachers' Levels of Ecological Citizenship International Electronic Journal of Environmental Education. Vol.9, Issue 1, 2019, 46-61.
- Van der Werff, E., Steg, L., & Keizer, K. (2013). The value of environmental self-identity: The relationship between biospheric values, environmental self-identity and environmental preferences, intentions and behaviour. *Journal of Environmental Psychology*, 34(3), 55-63. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2012.12.006>.
- Van der Werff, E., Steg, L., & Keizer, K. (2014). I am what I am by looking past the present: The influence of biospheric values and past behavior on environmental self-identity. *Environment and Behavior*, 46(5), 626-657. <https://doi.org/10.1177/00139165124752091>.